

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan agar visi dan misi yang sudah diuraikan dalam tujuan dan sasaran dapat dicapai. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Cirebon dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Begitu juga strategi dan arah kebijakan perangkat daerah juga

dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan integral untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon, maka rumusan strategi harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk menciptakan output dan outcome bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Strategi harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama, indikator keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu juga untuk menciptakan budaya berpikir strategis untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan daerah merupakan penerjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam rencana kerja strategis yang dapat dioperasionalkan. Hal-hal strategis mencakup segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan. Pendekatan komprehensif digunakan dalam langkahlangkah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi harus disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui berbagai

program prioritas indikatif. Selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan daerah akan mengarahkan langkah dan waktu pencapaian indikator masing-masing sasaran dan sekaligus memberi pedoman rentang waktu pelaksanaan suatu strategi dalam kurun waktu 2019 - 2024 sebagai periodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon.

Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 juga harus selaras dengan periode perencanaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025. Berdasarkan dokumen RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat dengan Visi yaitu "Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Beriman dan Produktif Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Sejahtera". Pada periode keempat RPJPD Kabupaten Cirebon pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitas akan terwujud

jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain:

- 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
- 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
- 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
- 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

arah kebijakan. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon adalah :

- 1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- 2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- 4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk yang cerita atau skenario strategi.

Salah satu metode untuk menentukan strategi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penggunaan analisis SWOT. Metode ini digunakan karena lebih sederhana dan banyak dipahami oleh stakeholders pembangunan di Kabupaten Cirebon. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dilakukan terlebih dahulu agar penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inheren. Input utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam faktor internal atau eksternal.

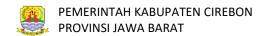
Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi-strategi yang terbagi ke dalam empat kuadran. Kuadran I adalah strategi S-O yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau strength (S) untuk memanfaatkan kesempatan atau opportunities (O). Kuadran II adalah strategi W-O yang merupakan

strategi untuk meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dengan memanfaatkan kesempatan atau opportunities (O). Kuadran III adalah strategi S-T yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau strength (S) guna menjawab tantangan threats (T) yang dihadapi. Sedangkan, Kuadran IV adalah strategi W-T yang merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dengan menjawab tantangan threats (T) yang dihadapi.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan 2019-2024 secara terperinci adalah sebagai berikut :

- Strategi 1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya
- Strategi 2. Pengembangan fasilitasi aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya
- Strategi 3. Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal
- Strategi 4. Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa
- Strategi 5. Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal
- Strategi 6. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya
- Strategi 7. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan
- Strategi 8. Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan
- Strategi 9. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan
- Strategi 10. Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja
- Strategi 11. Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten
- Strategi 12. Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja

- Strategi 13. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
- Strategi 14. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial
- Strategi 15. Peningkatan kerukunan antar umat beragama
- Strategi 16. Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal
- Strategi 17. Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan
- Strategi 18. Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif
- Strategi 19. Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan
- Strategi 20. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal
- Strategi 21. Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah
- Strategi 22. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Strategi 23. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Strategi 24. Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima
- Strategi 25. Optimalisasi pendapatan asli daerah
- Strategi 26. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan
- Strategi 27. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance
- Strategi 28. Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)
- Strategi 29. Optimalisasi Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa



- Strategi 30. Peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa
- Strategi 31. Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan
- Strategi 32. Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan
- Strategi 33. Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Strategi-strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

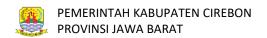
Strategi merupakan serangkaian skenario-skenario selama 5 tahun yang dipandu dengan arah kebijakan dan dipayungi oleh tema/fokus tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk suatu arah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konkret untuk memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-

strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon

	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
2.	Pengembangan fasilitasi	Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
	aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi	mengembangan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat
	pengembangan budaya	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan
3.	Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal	Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal
4.	Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa	Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan
5.	Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	mengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata menyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata



	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		meningkatkan Tata kelola keragaman	
6.	6. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya	budaya dan kesenian	
		meningkatkan kapasitas, pengetahuan	
		dan keterampilan pelaku usaha wisata	
		budaya	
		Memperluas jaminan akses dan fasilitasi	
7	Peningkatan aksesibilitas dan	pendidikan dasar	
* •	pemerataan kualitas	meningkatkan kualitas layanan dan	
	pendidikan serta peningkatan	pendidikan yang inklusif	
	kualitas SDM bidang	Melakukan Penguatan pendidikan karakter	
	pendidikan	berbasis keluarga	
	penalahan	meningkatkan Kualitas SDM bidang	
		pendidikan	
		Memperluas akses cakupan layanan	
		kesehatan bagi masyarakat	
		meningkatan derajat kesehatan	
		masyarakat melalui kualitas layanan	
Q	Peningkatan kualitas	kesehatan	
0.	kesehatan dan keterjangkauan	mengembangan dan penguatan KIE	
	cakupan layanan kesehatan	Kesehatan Keluarga	
	ounapan injunan noonatan	meningkatkan peran serta masyarakat	
		dalam penyelenggaraan kesehatan dan	
		menjaga kebersihan lingkungan	
		meningkatan pelayanan Keluarga	
		Berencana,	
		Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan	
9.	Perlindungan sosial bagi	Pendampingan kelompok usaha bagi	
	kelompok rentan	warga rentan	
	notompon roman	meningkatkan Partisipasi Perempuan	
		dan Anak dalam pembangunan	
10	. Perluasan kesempatan kerja	Harmonisasi kompetensi SDM yang	
	yang didukung oleh peningkatan	sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga	
	daya saing tenaga kerja	kerja	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	meningkatkan kualitas, produktifitas	
	dan perlindungan bagi tenaga kerja	
	mengptimalikan Balai Latihan Kerja	
	(BLK) dan BLK Komunitas dalam	
	memperluas kesempatan kerja bagi	
	masyarakat	
11.Penguatan kelompok usaha	Meningkatkan kualitas kelembagaan	
dalam rangka membangun	dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro	
kemandirian ekonomi berbasis	Kecil dan Menengah (UMKM) dan	
potensi lokal yang mendukung	BUMDes	
ekonomi unggulan kabupaten	DOMDCS	
12. Peningkatan Investasi untuk	Kemudahan perizinan, insentif pajak	
mendorong tumbuhnya	dan konsistensi kebijakan daerah untuk	
peluang kerja	mendukung iklim investasi	
13. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Mendorong Peran dan Kreativitas	
	pemuda dalam keolahragaan dan	
daram pembangunan	kepeloporan pemuda	
	meningkatkan peran serta masyarakat	
	dan penegak aturan untuk mengurangi	
14. Optimalisasi penegakan	penyakit masyarakat (PEKAT)	
regulasi ketertiban umum dan	meningkatkan kualitas layanan kegiatan	
peningkatan keshalehan sosial	keagamaan	
	Internalisasi nilai-nilai agama dalam	
	dunia pendidikan	
	memperkuat dan mengoptimalkan peran	
	Forum Antar Umat Beragama dalam	
15. peningkatan kerukunan antar	rangka menjaga kerukunan antar umat	
umat beragama	beragama	
umat beragama	Menjalin dan meningkatkan kemitraan	
	dengan lembaga sosial keagamaan seperti	
	DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll	
16. Pengembangan potensi usaha	Mengoptimalkan dukungan sektor	
pertanian, perdagangan,	swasta dalam pemerataan ekonomi	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
perindustrian dan jasa berbasis	meningkatkan kemitraan strategis	
sumber daya lokal	dengan sektor swasta (public private	
	partnership) untuk mendukung	
	pengembangan ekonomi lokal	
	Melakuakan perlindungan kawasan	
	pertanian dan perikanan	
	Mengembangkan sektor ekonomi	
	inklusif berbasis pariwisata yang	
17. Penciptaan pusat-pusat	didukung oleh potensi daerah dan	
pengembangan baru berbasis	budaya lokal yang berdaya saing	
pada kegiatan ekonomi	Mengembangkan sumberdaya ekonomi	
unggulan	lokal yang dapat memicu perkembangan	
	wilayah dan memberikan dampak	
	kemajuan pada daerah sekitarnya	
	memperbaiki tata niaga, jalur dan rantai	
	distribusi barang	
18. Peningkatan daya saing	Melakukan pengawasan peredaran	
komoditas unggulan	barang dan sarana prasarana produksi	
berdasarkan keunggulan	memperluas sumber pendapatan	
kompetitif dan komparatif	alternatif	
Rompetitii dan Romparatii	menambah akses pasar rakyat	
	mengembangkan sektor pertanian,	
	industri, perdagangan dan jasa	
19. Pengembangan ekonomi	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi	
inklusif dan berkeadilan	kerakyatan melalui afirmasi kebijakan	
	untuk usaha-usaha produktif.	
	meningkatkan produksi sektor	
	pertanian	
20. Penguatan Ketahanan Pangan	Memperbaiki tata kelola distribusi	
Daerah berbasis produksi	pangan daerah	
pangan lokal	Memperbaiki pola konsumsi dan	
	peningkatan keamanan pangan	

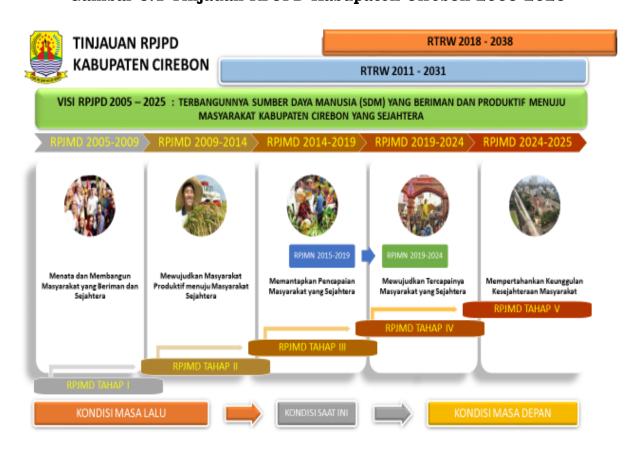
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
21. Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan koneksivitas antar wiayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan	
22. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	peningkatan manajeman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	
23.Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima	Meningkatkan intensitas , profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan	
24. Optimalisasi pendapatan asli daerah	meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah	
25. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif	
26. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance	meningkatkan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi meningkatkan kualitas dan kebijakan	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	publik yang partisifatif melalui	
	kemudahan dan transparansi akses	
	pengaduan masyarakat dan informasi	
	produk hukum daerah	
	Meningkatkan kapasitas pemerintah	
	desa dalam menyelenggarakan	
	pembangunan dan pelayanan publik	
27. Peningkatan tata kelola dan	serta Memperjelas kewenangan desa	
kapasitas penyelenggaraan	Meningkatkan kualitas SDM lembaga	
pemerintahan desa yang baik	kemasyarakatan desa / kelurahan	
(good governance)	dalam perencanaan pembangunan desa	
	Meningkatkan kapasitas pendamping	
	desa dan Aparatur kecamatan selaku	
	Pembina desa	
28. Mengoptimalkan Dana Desa	Mensinergikan perencanaan dan	
dari APBN dalam rangka	penganggaran desa / kelurahan dengan	
meningkatkan status kemajuan	perencanaan dan penganggaran	
dan kemandirian desa serta	Pemerintah Daerah	
sinergitas pencapaian prioritas	Meningkatkan kapasitas Aparatur	
pembangunan daerah dan	pemerintahan desa / Kelurahan dalam	
prioritas pembangunan desa	perencanaan dan penganggaran Desa	
	mendayagunkan aset desa dan	
	keuangan desa untuk menyejahterakan	
29. Peningkatan dan	masyarakat desa	
pengembangan ekonomi lokal	mengembangkan ekonomi desa yang	
di desa terutama Badan Usaha	menitik beratkan pada pemanfaatan	
Milik Desa	potensi desa, peningkatan produktivitas;	
	pembukaan lapangan kerja; serta	
	kesejahteraan warga	
30. Peningkatan peran dan sinergitas	menguatkan dan mengembangkan	
semua stakeholder dalam	kapasitas SDM pelaku kawasan	
percepatan pembangunan	perdesaan dan peningkatan	
kawasan perdesaan	infrastruktur kawasan perdesaan	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
31.Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	meningkatkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban mayarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat	
32.Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025.

Gambar 6.1 Tinjauan RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025

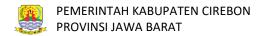


Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2019-2024) disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini

Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun Mengoptimalkan pertumbuhan 2022 ekonomi yang Mengoptimalkan Tahun pembangunan inklusif. 2021 Mengoptimalkan Tahun berkeadilan, dan SDM dan emberdayaan pemerataan 2020 kebijakan dan konomi yang kesejahteraan Pengembangan program inklusif, infrastruktur penanggulangan masyarakat berkeadilan, dan untuk untuk kemiskinan untuk **demacu** berkelanjutan mewujudkan meningkatkan mewujudkan pemerataan untuk pengurangan daya saing dan akses terhadap pertumbuhan embangunan dan kemiskinan dan layanan dasar, kemandirian pertumbuhan ekonomi yang peningkatan daerah daya tarik inklusif, adil, dan ekonomi keberdayaan investasi, dan berkelanjutan berkelanjutan masyarakat dengan pertumbuhan untuk didukung oleh ekonomi yang meningkatkan pembangunan inklusif dan adil kesejahteraan SDM masyarakat kabupaten cirebon

Gambar 6.2 Tema/Fokus Tahunan RPJMD Kabupaten Cirebon

Merujuk arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan di atas maka disampaikan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Tabel 6.2 di bawah ini.



Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Cirebon

VISI: "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,				
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
KABUPATEN (CIREBON BERBI	UDAYA		
MISI 1: Mewu	judkan masyara	kat yang menjunjung		
tinggi dan me	lestarikan nilai-	nilai budaya, tradisi		
dan adat istia	dat			
1.	1.1.	Optimalisasi,	Meningkatkan	
Melestarikan	Meningkatnya	perlindungan,	pengembangan dan	
dan	pelestarian	pengembangan dan	pelestarian kekayaan	
menumbuh	dan	pemanfaatan kekayaan	dan keragaman	
kembangkan	pengembangan	dan keragaman budaya.	budaya lokal yang	
budaya	budaya		strategis untuk	
Masyarakat	masyarakat		direvitalisasi	
		Pengembangan fasilitasi	Meningkatkan	
		aktifitas-aktifitas	pelestarian Tata Nilai	
		masyarakat yang	Budaya	
		berorientasi	Pengembangan potensi	
		pengembangan budaya	budaya yang dimiliki	
			oleh masyarakat	
			Internalisasi nilai-nilai	
			budaya dalam dunia	
			pendidikan	
		Penguatan institusi-	Pendataan institusi	
		institusi budaya yang	budaya yang masih	
		berakar pada nilai-nilai	aktif dan yang pernah	
		lokal.	ada	
			Pembinaan, revitalisasi	
			dan kerjasama	
			institusi budaya lokal	

		Pengarusutamaan	Mengoptimalkan
		pengembangan budaya	pembentukan rintisan
		dalam perencanaan	desa/kampung budaya
		daerah dan desa.	sinkronisasi dan
			sinergitas program
			kabupaten dan desa di
			bidang kebudayaan
	1.2.	Pengembangan sektor	Pengembangan paket-
	Berkembang	wisata berbasis budaya	paket wisata budaya
	nya sektor	melalui Pengembangan	dan kerjasama dalam
	wisata	Promosi kegiatan wisata	promosi wisata
	berbasis	dengan memanfaatkan	Penyelenggaraan
	budaya.	budaya lokal	event-event budaya
			yang dapat bermanfaat
			bagi pengembangan
			wisata
		Pengembangan SDM	Peningkatan Tata
		pelaku wisata budaya.	kelola keragaman
			budaya dan kesenian
			Peningkatan kapasitas,
			pengetahuan dan
			keterampilan pelaku
			usaha wisata budaya
KABUPATEN C	IREBON SEJAH	ITERA	
MISI 2: Menin	gkatnya kualita	s hidup masyarakat mela	lui pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan			
pelatihan, kes	ehatan dan eko	nomi	
1.	1.1.	Peningkatan	Perluasan jaminan
Mewujudkan	Meningkatnya	aksesibilitas dan	akses dan fasilitasi
pembanguna	derajat	pemerataan kualitas	pendidikan dasar
	1 11 111	1 1 1 1 1	

pendidikan serta

peningkatan kualitas

SDM bidang pendidikan.

pendidikan

masyarakat.

n manusia

berkualitas

dan sejahtera

yang

Peningkatan kualitas

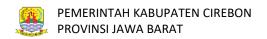
layanan dan

inklusif

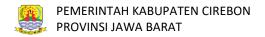
pendidikan yang

		Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga
		Peningkatan Kualitas SDM bidang
		pendidikan
		Meningkatkan minat
		baca masyarakat
1.2.	Peningkatan kualitas	Memperluas akses
Meningkatnya	kesehatan dan	cakupan layanan
derajat	keterjangkauan	kesehatan bagi
kesehatan	cakupan layanan	masyarakat
masyarakat	kesehatan.	Peningkatan derajat
		kesehatan masyarakat
		melalui kualitas
		layanan kesehatan
		Pengembangan dan
		penguatan KIE
		Kesehatan Keluarga
		Peningkatan peran serta
		masyarakat dalam
		penyelenggaraan
		kesehatan dan menjaga
		kebersihan lingkungan
		Peningkatan
		pelayanan keluarga
		berencana
1. 3	Perlindungan sosial bagi	Fasilitasi jaminan
Menurunnya	kelompok rentan	sosial bagi warga
angka		rentan
kemiskinan		Pendampingan
		kelompok usaha bagi
		warga rentan

N a	1.4. Menurunnya angka pengangguran	Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja.	Mewujudkan smart society Penguatan perlindungan dan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Peningkatan kualitas,
			produktifitas dan perlindungan bagi tenaga kerja Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
		Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten. Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim
			investasi



	1		I
	1.5	Peningkatan peran	
	Meningkatnya	pemuda dalam	
	Prestasi	pembangunan	Mendorong Peran dan
	olahraga dan		Kreativitas pemuda
	peranan		dalam keolahragaan
	pemuda		dan kepeloporan
	dalam		pemuda
	pembangunn		
VADIIDATEN C	CIREBON AGAM	10	
	_ ,	s hidup masyarakat Kabu	-
	_	nilai agama, budi pekerti	T
1.	1.1.	Optimalisasi penegakan	meningkatkan peran
Meningkatkan	Menurunnya	regulasi ketertiban	serta masyarakat dan
keshalehan	angka asusila	umum dan peningkatan	penegak aturan untuk
sosial dan	masyarakat.	keshalehan sosial.	mengurangi penyakit
kerukunan			masyarakat (PEKAT)
antar dan			meningkatkan kualitas
inter umat			layanan kegiatan
beragama			keagamaan
			Internalisasi nilai-nilai
			agama dalam dunia
			pendidikan
	1.2.	peningkatan kerukunan	memperkuat dan
	Menurunnya	antar umat beragama.	mengoptimalkan peran Forum Antar Umat
	pergesekan		Beragama dalam
	(friksi) antar		rangka menjaga
	dan internal		kerukunan antar umat
	umat		beragama
	beragama		Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan seperti DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll
	Ī		1



KABUPATEN CIREBON MAJU

MISI 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	1.1.	Pengembangan potensi	Mengoptimalkan
Meningkatkan	Meningkatnya	usaha pertanian,	dukungan sektor
pertumbuhan	pertumbuhan	perdagangan,	swasta dalam
ekonomi dan	ekonomi	perindustrian dan jasa	pemerataan ekonomi
pengembangan	sektor	berbasis sumber daya	Meningkatkan
wilayah yang	unggulan.	lokal.	kemitraan strategis
berkeadilan			dengan sektor swasta
berkelanjutan,			(public private
dan			partnership) untuk
berwawasan			mendukung
lingkungan.			pengembangan
			ekonomi lokal
			Melakukan
			perlindungan kawasan
			pertanian dan
			perikanan
		Penciptaan pusat-pusat	Mengembangkan sektor
		pengembangan baru	ekonomi inklusif
		berbasis pada kegiatan	berbasis pariwisata yang
		ekonomi unggulan dan	didukung oleh potensi
		mewujudkan smart	daerah dan budaya lokal
		economy	yang berdaya saing
			Mengembangkan
			sumberdaya ekonomi
			lokal yang dapat memicu
			perkembangan wilayah
			dan memberikan
			dampak kemajuan pada
			daerah sekitarnya

	1.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif dan mengembangkan smart branding Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal.	Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi memperluas sumber pendapatan alternatif menambah akses pasar rakyat mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif. Meningkatkan produksi sektor pertanian Memperbaiki tata kelola distribusi pangan daerah Memperbaiki Pola konsumsi dan peningkatan keamanan
			konsumsi dan peningkatan keamanan
Tuines			pangan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.3.	Penyediaan prasarana	Mewujudkan
	Meningkatnya	dan sarana infrastruktur	infrastruktur yang berkeadilan antar
	penyediaan	IIII asa aktai	on nounair airea

	107704004	1 1 ' 1	1 1
	layanan	sumberdaya air dan	koneksivitas antar
	infrastruktur	permukiman yang handal dan terintegrasi	wiayah terutama pada kawasan pusat
	wilayah.	guna mendukung	pertumbuhan wilayah
		terciptanya	dan kawasan perbatasan
		keseimbangan	berbasis keruangan
	1.4.	pembangunan wilayah	maninal ration
		Peningkataan	meningkatkan
	Meningkatnya	perlindungan dan	manajeman dan peran
	kualitas	pengelolaan lingkungan	serta masyarakat
	lingkungan	hidup.	dalam pengelolaan
	hidup.		lingkungan hidup
			Meningkatkan
			pengawasan dan
			pengendalian
			lingkungan
			Meningkatkan kualitas
			dan penyediaan air
			serta kualitas udara
			Mewujudkan dan
			menyusun roadmap
			smart environment
		Peningkatan partisipasi	Peningkatan jumlah
		masyarakat dalam	kelompok masyarakat
		pengelolaan sampah	yang melakukan
			aktivitas pengelolaan
			sampah mandiri
2.	3.1.	Optimalisasi manajemen	Meningkatkan intensitas
Terselenggara	Meningkatnya	pelayanan publik	, profesionalitas dan
nya tata	kapasitas	dengan mengedepankan	kapasitas dan kesejahteraan sumber
kelola	pemerintah	pelayanan prima.	daya aparatur
pemerintahan	dan kualitas		pemerintahan daerah
yang baik dan	pelayanan		menyederhanakan
bersih	publik		mekanisme dan
	-		standar pelayanan

		Meningkatkan mutu
		penyelenggaraan
		kearsipan daerah dan
		kinerja pengelolaan
		kearsipan
	Optimalisasi	-
	-	meningkatkan
	pendapatan asli daerah	kemampuan keuangan
		daerah terutama
		pendapatan asli
		daerah dalam rangka
		mewujudkan
		kemandirian daerah
3.2.	Integrasi perencanaan,	meningkatkan
Meningkatnya	penganggaran,	Akuntabilitas
akuntabilitas	pengawasan dan	perencanaan,
penyelenggar	pelaporan.	penganggaran, pengawasan dan
aan		pelaporan secara
pemerintah		profesional dan inovatif
3.3.	Penguatan Sistem	meningkatkan
Meningkatnya	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian <i>smart</i> <i>governance</i> .	aksesibilitas,
maturitas		kemudahan dan
pemerintahan		kesederhanaan serta
berbasii		kepastian pelayanan
elektronik.	9000.700.000	public
		Meningkatkan kualitas
		tata kelola
		pemerintahan yang
		cerdas melalui
		revitalisasi reformasi
		birokrasi dan
		menyusun roadmap Smart Governance
		meningkatkan kualitas
		dan kebijakan publik
		yang partisifatif melalui

			kemudahan dan
			transparansi akses
			pengaduan masyarakat
			dan informasi produk
			hukum daerah
3.4.		Peningkatan tata kelola	Meningkatkan
Meni	ngkatnya	dan kapasitas	kapasitas pemerintah
kema	ajuan	penyelenggaraan	desa dalam
dan		pemerintahan desa yang	menyelenggarakan
Kema	andirian	baik (good governance)	pembangunan dan
Desa	L .		pelayanan publik serta
			Memperjelas
			kewenangan desa.
			Meningkatkan kualitas SDM lembaga
			kemasyarakatan desa / kelurahan dalam
			perencanaan
			pembangunan desa
			Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan
			Aparatur kecamatan
			selaku Pembina desa
		Mengoptimalkan Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan	Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
		daerah dan prioritas pembangunan desa	Meningkatkan kapasitas
		pombanganan acsa	Aparatur pemerintahan
			desa dalam perencanaan
			dan penganggaran Desa
		Peningkatan Pengembangan Ekonomi	mendayagunkan aset desa dan keuangan
		Lokal di Desa terutama	desa untuk menyejahterakan masyarakat desa

		Badan Usaha Milik Desa	mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan warga
		Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan.	menguatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan
KABUPATEN C	IREBON AMAN		
MISI 5: Memel	ihara keamana	n ketertiban umum	
untuk mewuju	dkan kondusiv	itas daerah guna	
mendukung te	rciptanya stabi	litas nasional	
1.	1.1.	Peningkatan upaya	Meningkatkan
Meningkatkan	meningkatny	pencegahan-pencegahan	penegakan hukum dan
keamanan,	a ketertiban	dan pemeliharaan	pemeliharaan ketentraman,
ketertiban	umum	ketentraman, ketertiban	ketertiban mayarakat
dan		dan keamanan	secara komprehensif
ketentraman		lingkungan	serta peningkatan
masyarakat			pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat
	1.2.	Pencapaian efektifitas	Mengurangi risiko
	Menurunnya	penyelenggaraan	bencana dan
	resiko	penanggulangan	meningkatkan ketangguhan
	bencana.	bencana.	pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024. Fungsi RTRW Kabupten adalah:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon.
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Cirebon
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten Cirebon yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga meliputi:

- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
- c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga
- 2) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;

- b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembanangan pasca pertanian.

Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
- b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.

Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

- a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
- b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang
 Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
- 3) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
- b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.

Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
- b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.
- 4) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan c.
 mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:

a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;

 b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata

5) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6.4 Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam

Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan kebijakan terkait dengan standar pelayanan minimal, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, standar pelayanan minimal hanya diterapkan pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun Standar pelayanan minimal yang baru mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 6 (enam) SPM Kabupaten, dengan rincian dan penerapannya dalam Tabel 6.3 sebagai berikut.

Tabel 6.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD

Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Jenis P	elayanan	Program	Inc	likator Kinerja	Perangkat Daerah
	Dasar		Perangkat	Pro	gram	Penanggungjawab
			Daerah Terkait			
			Pelaksanaan			
			Jenis Pelayanan			
			Dasar			
SPN	I Pendidik	an				
1	pendidika	an anak	Program	1	Meningkatnya	Dinas Pendidikan
	usia dini	(Usia 5-	Pendidikan		Capaian	
	6 tahun) berupa	Anak Usia Dini		Prosentase APk	
	perlengka	apan			PAUD	
	dasar	peserta		2	Ketersediaan	Dinas Pendidikan
	didik PA	UD yang				
		<i>j</i> - <i>g</i>			Sarana dar	
	miskin				Prasarana	
					Sekolah PAUD	

2	Pendidikan dasar (Usia 7-12 tahun) dan usia 12-15 tahun berupa perlengkapan dasar peserta	Belajar Pendidikan		Meningkatnya Capaian Prosentase APK SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	didik SD dan SMP yang miskin		2	Meningkatnya Capaian Prosentase APM SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	Jenis Pelayanan Dasar			likator Kinerja ogram	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			3	Meningkatnya prosentase capaian angka siswa yang melanjutkan sekolah SMP dan SMU	Dinas Pendidikan
			4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Meningkatnya Prosentase guru TK, SD, SMP, yang memiliki kualifikasi S1/D4	Dinas Pendidikan

				λ.σ	D: D 1: 1:1
			2	Meningkatnya _	Dinas Pendidikan
				Prosentase	
				guru yang	
				memiliki	
				sertifikasi	
3	Pendidikan	Program		Meningkatnya	Dinas Pendidikan
	Kesetaraan (Usia	Pendidikan		angka	
	7-18 tahun)	Non Formal		kelulusan	
	berupa			Paket A Setara	
	perlengkapan			SD, Paket B	
	dasar peserta			Setara SMP,	
	didik pendidikan			Paket C Setara	
	kesetaraan yang			SMA	
	miskin				
SPM	I Kesehatan				
1	pelayanan	Program		Prosentase	Dinas Kesehatan
	kesehatan ibu	Peningkatan		penanganan	
	hamil;	Keselamatan		ibu hamil	
		Ibu Melahirkan		resiko tinggi	
No	Jenis Pelayanan	Program	Ind	likator Kinerja	Perangkat Daerah
	Dasar	Perangkat	Pro	ogram	Penanggungjawab
		Daerah Terkait		-	30 3
		Pelaksanaan Jenis Pelayanan			
		Dasar			
2	pelayanan	Program		Prosentase	Dinas Kesehatan
	kesehatan ibu	Peningkatan		penanganan	
	bersalin;	Keselamatan Ibu Melahirkan		ibu hamil	
				resiko tinggi	
3	. pelayanan	Program		Prosentase neo	Dinas Kesehatan
	kesehatan bayi	Peningkatan		komplikasi	
	baru lahir;	Pelayanan		yang ditangani	
		Kesehatan			
		Anak Balita			

kesehatan balita; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5 pelayanan Kesehatan Anak Balita 5 pelayanan Program Upaya Kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6 pelayanan Program Pengendalian usia produktif; Penyakit Tidak Menular (PTM) 7 pelayanan Program Pengendalian usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai standar 8 pelayanan Program Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi dan benjayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) 8 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan penderita Penyakit Tidak hipertensi; yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan penderita Dinas Kesehatan	4	pelayanan	Program	Prosentase neo	Dinas Kesehatan
Keschatan Anak Balita Program Upaya kesehatan pada usia pendidikan dasar; Program Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Pelayanan Resehatan pada usia lanjut; Pelayanan Pelayanan Pelayanan Resehatan Usia Lanjut Pengendalian Pengendalian Peningkatan Pelayanan Resehatan Usia Lanjut Persentase Persentase Dinas Kesehatan DM yang dilayani sesuai standar Posentase Peningkatan Pelayanan Resehatan Usia Lanjut Standar Persentase Pengendalian Penderita Penyakit Tidak hipertensi; yang dilayani sesuai standar Persentase Pengendalian Penderita Penyakit Tidak hipertensi; yang dilayani sesuai standar Persentase Persentase Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Penderita Penderita Penderita Pengendalian Penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Persentase Dinas Kesehatan Penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase Dinas Kesehatan Penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase Pengendalian Penderita DM yang dilayani penderita DM pengendalian Pengenderita hipertensi dan DM yang		kesehatan balita;	Peningkatan	komplikasi	
Balita B			Pelayanan	yang ditangani	
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;			Kesehatan Anak		
kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6 pelayanan Pengendalian usia produktif; Penyakit Tidak Menular (PTM) 7 pelayanan Pengendalian Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Pelayanan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut 8 pelayanan Pengendalian Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 8 pelayanan Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) Persentase Dinas Kesehatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Pengendalian Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Dinas Kesehatan Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Dinas Kesehatan Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar Pergendalian Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Dinas Kesehatan Pengenderita DM yang dilayani sesuai standar Pergendalian Pengenderita DM yang dilayani sesuai standar Pergendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)			Balita		
usia pendidikan dasar; 6 pelayanan Program Pengendalian usia produktif; Penyakit Tidak Menular (PTM) Pelayanan Pengendalian penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar 7 pelayanan Peningkatan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut standar 8 pelayanan Pengendalian Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) 8 pelayanan Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) 9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) 9 pelayanan Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) 10 pelayanan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengenderita DM; Pengendalian Pengenderita DM Pengenderit	5	pelayanan	Program Upaya	Indeks keluarga	Dinas Kesehatan
dasar; 6 pelayanan Program Pengendalian penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar 7 pelayanan Pengram Program Prosentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar 8 pelayanan Program Persentase penderita penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 8 pelayanan Program Persentase penderita penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai standar Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar		kesehatan pada	Kesehatan	sehat (IKS)	
6 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar 7 pelayanan Pengram Program Prosentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Resehatan Usia Lanjut Sesuai standar 8 pelayanan Program Persentase penderita lanjut sesuai standar 8 pelayanan Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Pengendalian Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Sesuai standar 10 pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Sesuai standar Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Sesuai standar Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar Pengendalian Pengendalian Pengenderita hipertensi dan DM yang		usia pendidikan	Masyakat		
kesehatan pada usia produktif; Penyakit Tidak Menular (PTM) 7 pelayanan Program Pensentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 8 pelayanan Program Persentase pelayanan kesehatan Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi; Menular (PTM) dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit Tidak hipertensi dan penderita hipertensi dan penderita hipertensi dan DM yang		dasar;			
usia produktif; Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Program kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan Usia Lanjut Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar Persentase penderita penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar Persentase penderita Persentase penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Pengendalian penderita DM yang dilayani penderita DM yang dilayani penderita hipertensi dan DM yang Dinas Kesehatan Pengendalian penderita hipertensi dan DM yang	6	pelayanan	Program	Persentase	Dinas Kesehatan
Menular (PTM) DM yang dilayani sesuai standar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan Usia Lanjut Pengendalian penderita hipertensi; Menular (PTM) Persentase penderita penderita hipertensi; Menular (PTM) Persentase penderita Dinas Kesehatan penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM; Penyakit Tidak penderita DM; Penyakit Tidak penderita DM; Penyakit Tidak penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Dinas Kesehatan penderita DM yang dilayani sesuai standar Dinas Kesehatan penderita DM yang dilayani sesuai standar Dinas Kesehatan penderita DM yang dilayani sesuai standar		kesehatan pada	Pengendalian	penderita	
sesuai standar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut penderita penderita penderita hipertensi; Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) pelayanan kesehatan penderita DM; Pengendalian penderita DM; Pengendalian penderita DM; Pengendalian penderita DM; Pengendalian penderita DM pengendalian penderita hipertensi dan DM yang Dinas Kesehatan		usia produktif;	Penyakit Tidak	hipertensi dan	
7 pelayanan			Menular (PTM)	DM yang dilayani	
kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase penderita hipertensi; Menular (PTM) Penyakit Tidak penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Dinas Kesehatan Persentase penderita hipertensi dan DM yang				sesuai standar	
usia lanjut; Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 8 pelayanan Program Pengendalian penderita Penyakit Tidak hipertensi; Menular (PTM) Persentase penderita DM; penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit Tidak Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 10 pelayanan Resehatan orang dengan Pengendalian	7	pelayanan	Program	Prosentase	Dinas Kesehatan
Kesehatan Usia Lanjut Persentase penderita penderita hipertensi; Menular (PTM) Persentase penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM yang dilayani penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita hipertensi dan DM yang		kesehatan pada	Peningkatan	pelayanan	
Lanjut standar		usia lanjut;	Pelayanan	kesehatan usia	
8 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan Pengendalian penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita Dinas Kesehatan Pengendalian Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang			Kesehatan Usia	lanjut sesuai	
kesehatan penderita penderita hipertensi; Menular (PTM) Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita hipertensi dan hipertensi dan DM yang			Lanjut	standar	
penderita Penyakit Tidak hipertensi yang dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan Pengendalian penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi dan DM yang dengan Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang	8	pelayanan	Program	Persentase	Dinas Kesehatan
hipertensi; Menular (PTM) dilayani sesuai standar 9 pelayanan Program Persentase penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita hipertensi dan penderita hipertensi dan penderita penderita penderita penderita penderita penderita penderita penderita hipertensi dan penderita penderita penderita penderita penderita hipertensi dan penderita		kesehatan	Pengendalian	penderita	
9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan kesehatan Pengendalian penderita DM penderita DM; Penyakit Tidak yang dilayani Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita kesehatan orang dengan Pengendalian Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang		penderita	Penyakit Tidak	hipertensi yang	
9 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan kesehatan Pengendalian penderita DM yang dilayani penderita DM; Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Program Persentase penderita kesehatan orang dengan Penyakit Tidak DM yang		hipertensi;	Menular (PTM)	dilayani sesuai	
kesehatan Pengendalian penderita DM yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Pengendalian kesehatan orang dengan Penyakit Tidak Penyakit Tidak DM yang dilayani sesuai standar Persentase penderita hipertensi dan DM yang				standar	
penderita DM; Penyakit Tidak yang dilayani sesuai standar 10 pelayanan Program Pengendalian kesehatan orang dengan Penyakit Tidak Penyakit Tidak DM yang	9	pelayanan	Program	Persentase	Dinas Kesehatan
Menular (PTM) sesuai standar 10 pelayanan Program Resehatan orang dengan Penyakit Tidak DM yang Menular (PTM) sesuai standar Persentase penderita hipertensi dan DM yang		kesehatan	Pengendalian	penderita DM	
10 pelayanan Program Persentase Dinas Kesehatan kesehatan orang dengan Penyakit Tidak DM yang		penderita DM;	Penyakit Tidak	yang dilayani	
kesehatan orang Pengendalian penderita hipertensi dan DM yang			Menular (PTM)	sesuai standar	
dengan Penyakit Tidak hipertensi dan DM yang	10	pelayanan	Program	Persentase	Dinas Kesehatan
dengan Penyakit Tidak DM yang		kesehatan orang	Pengendalian	=	
		dengan	Penyakit Tidak	_	
gangguan jiwa Menular (PTM) dilayani sesuai		gangguan jiwa	Menular (PTM)	dilayani sesuai	
berat; standar		berat;		standar	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Program Penanggungjawab
11	pelayanan kesehatan orang dengan TB;	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan Dinas Kesehatan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam Prosentase imunisasi dasar lengkap
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV),	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam Prosentase imunisasi dasar lengkap
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pembinaan	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Dinas Sosial

3	Rehabilitasi sosial	Program				Dinas Sosial
	dasar lanjut usia	Pelayanan dan				
	terlantar di luar	Rehabilitasi				
	panti	Kesejahteraan				
		Sosial				
4	Rehabilitasi sosial	Program				Dinas Sosial
	dasar	Pembinaan				
	penyandang	Para				
	disabilitas	Penyandang				
	terlantar di luar	Cacat dan				
	panti	Trauma				
No	Jenis Pelayanan	Program	Ind	ikator	Kinerja	Perangkat Daerah
	Dasar	 Perangkat	Pro	gram	J	Penanggungjawab
		Daerah Terkait		O		33 G
		Pelaksanaan				
		Jenis				
		Pelayanan				
		Dasar				
_	Deulius description de la	Due sure un				Dinas Casial
5	Perlindungan dan					Dinas Sosial
	jaminan sosial	Pelayanan dan				
	pada saat tanggap					
	dan paska	J				
	bencana bagi	Sosial				
	korban bencana					
	kabupaten					
SPM	I Bidang Ketentrama	an Ketertiban Um	um	dan Perl	indungan	Masyarakat
1	Pelayanan yang	Program				Satpol Pamong
	terkena Dampak Gangguan	Pemeliharaan Ketentraman				Praja
	Trantibum akibat					
	penegakan	Umum Linmas				
	Hukum terhadap Penegakan Perda					
	dan Perkada	Tindak				
		Kriminal				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	Pelayanan	Program		Badan
	Informasi Rawan	Pencegahan		Penanggulangan
	Bencana (paling	Dini dan		Bencana Daerah
	sedikit memuat):	Penanggulangan		
	a. Penyusunan	Korban		
	Kajian Risiko	Bencana Alam		
	bencana			
	b. Komunikasi			
	Informasi &			
	Edukasi Rawan			
	Bencana			
3	Pelayanan	Program		Badan
	Pencegahan dan	Pencegahan Dini		Penanggulangan
	Kesiagsiagaan	dan		Bencana Daerah
	terhadap	Penanggulangan		
	Bencana	Korban Bencana		
		Alam		
4	Pelayanan	Program		Badan
	Penyelamatan	Pencegahan Dini		Penanggulangan
	dan Evakuasi	dan		Bencana Daerah
	Korban Bencana	Penanggulangan		
		Korban Bencana		
		Alam		
5	Pelayanan	Program		Dinas Pemadam
	Penyelamatan	Peningkatan Kesiagaan dan		Kebakaran
	dan Evakuasi	Pencegahan		
	Korban	Bahaya		
	Kebakaran	Kebakaran		
		Kebakaran		

SPN	I Bidang Pekerjaan	Umum		
1	Pemenuhan	Program	Prosentase	Dinas
	kebutuhan Pokok	Pengembangan	penduduk yanhg	Perumahan
	Air Minum	Kinerja	mendapatkan	Kawasan
	Sehari-hari	Pengelolaan Air	akses air minum	Permukiman dan
		Minum dan Air	yang aman	Pertanahan
		Limbah		
2	Penyediaan	Program		
	Pelayanan	Pengembangan		
	Pengolahan Air			
	Limbah Domestik	Kinerja		
	yang dapat diberikan melalui	Pengelolaan Air		
	dua cara yang	Minum dan Air		
	terdiri dari Sistem	Limbah		
	Pengelolaan Air			
	Limbah Domestik			
	Setempat (SPALD-S) dan Sistem			
	Pengelolaan Air			
	Limbah Domestik			
	Terpusat (SPALD-T)			
SPN	 ¶ Bidang Perumahar	l Rakyat		
1	Penyediaan dan	Program	Peningkatan	Dinas
	Rehabilitasi Rumah	Pengembangan	ketersediaan	Perumahan
	yang Layak Huni	Perumahan	dan kualitas	Kawasan
	Bagi Korban Bencana		perumahan	Permukiman dan
	Kabupaten/Kota		dan	Pertanahan
	merupakan jenis		permukiman	
	pelayanan dasar		-	
	yang dilaksanakan oleh Pemerintah		bagi	
	Kabupaten/Kota,		masyarakat	
	dengan ketentuan:			
	1) Pada saat masa			
	pasca bencana;			
	2) Surat penetapan			
	bencana dari			
	Bupati/Walikota;			

dan/atau			
3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten			
Pasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung: 1)Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau 2)Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Program Pengembangan Perumahan	ketersediaan dan kualitas perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

6.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat Prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2019-2024.

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA

Membangun Wahana atau Gedung Pusat Budaya sebagai Pusat Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sebagai ajang kreativitas seni dan budaya lokal Kabupaten Cirebon yang masih eksis dan hampir punah dari para seniman dan budayawan Cirebon agar dapat tetap lestari. Revitalisasi Sanggar Seni Budaya, Cirebon Tematik Festival, Cagar Budaya Lestari. Wisata berbasis Budaya.

2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA

Dalam rangka menjamin kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat pra sejahtera atau keluarga sangat miskin dan miskin sesuai indikator kemiskinan daerah/local dalam sistem yang terintegrasi (Kartu PEPEK Sejahtera). Kartu PEPEK ini merupakan kartu pelengkap bagi masyarakat miskin yang tidak tidak terlayani KIS atau Penerima Bantutan Iuran BPJS dari APBN, tidak terlayani Kartu Indonesia Pintar, Sembako Murah dan lain-lain. Mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa dengan mengembangkan produk unggulan desa dan meningkatkan BUMDes yang berkembang atau BUMDes yang Berdaya.

3. Kabupaten Cirebon **AGAMIS**

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendirikan Pusat kegiatan Keagamaan di Kabupaten Cirebon (Masjid Raya dan Islamic Center).

Langkah berikutnya adalah memasukkan atau mengintegrasikan nilainilai agama dalam pendidikan formal. Kegiatan MDTA terintegrasi dalam kegiatan Ekstrakuliruler wajib Sekolah dasar. Setelah urusan pemerintahan wajib terpenuhi dan sesuai kemampuan keuangan daerah, maka akan diberikan insentif bagi imam masjid dan musholah untuk menggerakkan melek huruf Al Quran dan gerakan magrib mengaji bagi umat Islam dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren.

4. Kabupaten Cirebon **MAJU**

Mendorong kemajuan Kabupaten Cirebon melalui pembangunan pusat masyarakat ekonomi digital dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing dan produk dari masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Desa Pintar (memanfaatkan teknologi informasi. Membangun dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis keruangan atau sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama Pusat kegiatan Lokal dan Pusat Pengembangan Kota.

5. Kabupaten Cirebon **AMAN**

Membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang sadar hukum melalui desa sadar hukum dan bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat melalui Sistem keamanan lingkungan Siaga dan Desa Tangguh Bencana terutama desa atau daerah yang rawan bencana.

6.6 Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

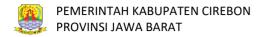
Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga tidak terlepas dari rencana dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis Provinsi Jawa Barat Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, antara lain tercantum dalam tabel 6.4 di bawah.

Tabel 6.4 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018-2023

		,	Sumber	Anggara	ın	
No	Kegiatan	APBN	APBD	KPBU	Swast	Target
					а	
1.1	Penyediaan Air Minum					
1	SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede)/	V	V	V		2023
1.2	Bendungan dan Jaringan Irigasi					
	Bendungan Kuningan	√	1			2021
II	Infrastruktur Daerah					
2.1	Jalan Lingkar Cirebon (22,3 km)	V	V			2023
2.2	Reaktivasi jalur kereta api Cirebon-Kadipaten	V	V			2022
2.3	Pengembangan Pelabuhan Cirebon			V	V	Jangka pendek 2020
2.4	Pembangunan Alun-alun		√			2020-2022
	Pengadaan peralatan Command Center		V			2019
	Pembangunan/Revitalisasi pasar kue weru		V			2019
2.5	Pembangunan Creative centre		V			2020-2022
2.6	Pembangunan pusat budaya		√			2020-2022
2.7	Pembangunan TPPAS Regional Cirebon Raya	V	V	V		2022
	PPI Gebangmekar	1	1		V	2022

2.8	Pengembangan	destinasi	$\sqrt{}$		2020
	wisata makam	Sunan			
	Gunung Jati				
2.9	Pengembangan	destinasi	$\sqrt{}$		2020
	Gebang Mekar				

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel 6.4.



Tabel 6.6 (Matriks Indikator Kinerja)

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Cirebon

				Rumu		Ca	apai	an Kir	nerja	a Progr	am	dan K	erai	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun 201	Tahu 2020	0 R	Tahu 202 Tar	1 R	Tahu 2022 Targ	2 R	Tahı 202 Targ	3 R	Tahu 202 Targ	4 R	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
	MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat					get	p	get	р	et	р	et	p	et	р		
	Tujuan Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya Masyarakat	Budaya daerah yang dilestarikan	Pros enta se		52 %	56 %		58 %		60 %		62 %		64 %			Disb udpar pora



	I HOVINGI JAWA DAHAT			Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 202	0	Tahun 2021		Tahu 2022		Tahı 202	3	Tahı 202		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R			Targ		Targ		Targ	R		
			T1	T1-		get	р	get	р	et	р	et	p	et	p		
			Juml ah	Jumla h													
			kary	karya													
			a	seni													
			seni	dan													
			yang	buday													
				a yang													
				didafta													
				rkan													
				untuk													
				menda													D: 1
	Sasaran 1.1	Maria data a da		pat								1					Disb
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya pelestarian karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk		HKI ke Kemen		1		1		1		1		1		5	udpar
	masyarakat	memperoleh Hak Kekayaan Intelektual		kumh		1		1		1				1		3	pora
		(HKI)		am													



	PROVINSI JAWA BAKAT			Rumu		Ca	apa	ian Kin	erja	Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran										
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 2020	0	2021	Tahun 2021 Tar R		2021		2021 Tar R I		2021 Tar R I		Tahun 2022		2022		2022		ın 3	Tahu 202	4	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar get	R p	get			к р	Targ et	p p	Targ et	R p												
			Juml ah kelo mpo k buda ya	Jumla h kelom pok /komu nitas buday a yang rutin mengg																							
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok /komunitas kebudayaan yang aktif		elar aktivit as buday a/seni minim	175	180		185		190		195		200			Disb udpar pora										



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PEIVIERIIVI ZILI IN ILI I

				Rumu		i									Peran		
				s/	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahı		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	202	1	202	2	202	3	202	4	unggula	ngun
	Tombungunun Buorun	outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201											•	b
					8)	Tar	R	Tar		Targ		Targ		Targ	R		
						get	p	get	р	et	p	et	р	et	p		
				al 5													
				kali													
				setahu													
				n													
			Juml	Jumlah													
			ah	cagar													
			caga	budaya													
			r	yang													
	Dua mana Dan malala an Walannan	Trumbala as man bardarra arang dibabala		dikelola	2												
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		secara	2	2		2		2		2		2			
	Budaya	secara terpadu	Juml	terpadu Jumla				4		4				2		Wisata	
			ah	h												berbasi	
	Program Pengelolaan Keragaman	Jumlah penyelenggaraan festival seni	festiv	penyel	4	8		8		8		8		8		s	Disbu
	Budaya	dan budaya	al	enggar	7	O		J		o o		O				s Budaya	dparp
	Dudaya	dan budaya	aı	aan												Бицауа	ora
				aan													UIA



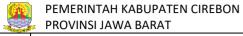
	THOUNDIDAWA DANAT			Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran																
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 202	0	202					2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		ın 2	Tahu 202	3	Tahu 202	4	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R			Targ		Targ		Targ	R																		
				6 1		get	p	get	р	et	р	et	р	et	p																		
				festival																													
				seni dan																													
				buday																													
				a yang																													
				digelar																													
				setiap																													
				tahun																													
			juml	Jumla																													
			ah	h																													
			kerja	kerjas																													
	Program Pengembangan		sama	ama/												Wisata																	
	Kerjasama Pengelolaan Kekayaan	Jumlah kerjasama/MoU dengan pihak	/Mo	MoU												berbasi	Disbu																
	Budaya	lain dalam pengelolaan kekayaan	U	denga	1	2		2		2		2		2		s	dparp																
		budaya/situs		n												Budaya	ora																
				pihak																													



	I NOVINSIJAWA DANAT			Rumu		Ca	apai	ian Kin	erja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				'	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
		In dilantan IZinania	Satu	la perhit	rja	∕T - 1								Tahı		Prrogra	h Pena
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/	an	ungan	Awal RPJ	Tahu 202		Tahu 202		Tahu 2022		Tahu 2023		202		m	
Kode	Pembangunan Daerah	outcome)	an	nnya	MD	202	U	202.	1	2022	4	202)	202	+	unggula	ngun
		outcome			ahun											n	g Jawa
					201											Bupati	b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		. ~
						get	р	get		et	р		p		р		
				lain													
				dalam													
				pengel													
				olaan													
				kekay													
				aan													
				buday													
				a/situ													
				s yang													
				bukan													
				milik													
				Pemda													
								1.00									
	Sasaran 1.2	Tourist with the state of	juml	Jumla	006	1.01		1.02		1.03		1 047		1.05			
	Berkembangnya sektor wisata	Jumlah wisatawan berbasis	ah	h	996.	6.3		6.5		6.7		1.047		7.6			
	berbasis budaya.	kebudayaan		wisata	330	56		20		85		.153		24			



	* I KOVINSIJAWA DAKAI			Rumu		C	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				,	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja			m 1		m 1						Prrogra	h
77. 1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	_	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	U	202	1	2022	2	202	3	202	4	unggula	ngun
		outcome)		nnya	MD											n	g Jawa
					ahun 201											Bupati	b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		5
						get	р	get	р		р		p		р		
				wan			-		-		1		_		1		
				berbas													
				is													
				kebud													
				ayaan													
			juml	jumla													
			ah	h													
				destin													
				asi													
				wisata													
				baru													
				yang												Wisata	
				dikem												berbasi	
	Program Pengembangan Destinasi	jumlah destinasi wisata yang		bangk												S	
	Pariwisata	dikembangkan		an	1	1		1		1		1		1		Budaya	
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama pengembangan	juml	Jumla	4	8		8		8		8		8		Wisata	



Г	26	Distance of the last	× PROVINSI JAWA BAKAT	T		В	1					D		1 17		1 D	. 1	1	Ъ
						Rumu		Ca	apa	ian Kin	erja	a Progra	am	dan K	erai	ngka P	end	lanaan	Peran
						s/	ondisi											Kaitan	gkat
						Formu	Kine											dengan	Daera
						la	rja											Prrogra	h
			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu	ın	Tahu	n	Tahu	n	Tahu	ın	Tahı	ın		Pena
	Koo	de		(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	2020	О	2021	L	2022	2	202	3	202	4	m	ngun
			Pembangunan Daerah	outcome)		nnya	MD											unggula	g
							ahun											n	Jawa
							201											Bupati	ь
							8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
								get	p	get		et	p	et	р		р		
-				kemitraan pariwisata dengan pelaku	ah	h	kerj											berbasi	
				pariwisata		kerjas	asa											s	
						ama	ma											Budaya	
						penge													
						mbang													
						an													
						kemitr													
						aan													
						pariwi													
						sata													
						denga													
						n													
						pelaku 													
						pariwi													
						sata													



	I NOVINGITAWA DANAT			Rumu		C	apai	ian Kin	erja	Progr	am	dan K	erai	ngka P	enda	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	ndisi Kine rja Awal RPJ MD ahun 201	Tahu 202		Tahu 2021		Tahu 2022		Tahu 202		Tahu 202		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	R T	`arg	R	Targ	R	Targ	R		
						get	p		*	et	p	et	p	et	p		
	MISI 2: Meningkatnya kualitas kualitas pendidikan dan pelatihan	hidup masyarakat melalui pemenuha a, kesehatan dan ekonomi	n kebut	tuhan da	isar m	asyara	kat,	, penii	ngka	atan							
	Tujuan				68,0	69,		69,		70,		70,		71,			
	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			5	15		68		21		73		24			
				Kombi													
				nasi													
			Tahu	antara													
			n	partisi													
				pasi													
	Sasaran 2.1	Rata rata Lama Sekolah		sekola												Cirebo	Dina
	Meningkatnya derajat pendidikan			h,												n	s
	masyarakat			jenjan												Sejahte	Pendi
				g		6,7		6,7		6,8		6,8		6,9		ra	dikan
				pendid	6,62	2		7		2		7		2			



	I NOVINGITAWA DANAT			Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				s/ Formu	ondisi Kine											Kaitan	gkat Daera
				la	rja											dengan	h
		Indikator Kinerja	Satu		Awal	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahı	ın	Prrogra	Pena
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	2020	0	202	1	202	2	202	3	202	4	m	ngun
	Pembangunan Daerah	outcome)		nnya	MD											unggula n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201							-			-		b
					8)			Tar		Targ et		Targ et		Targ et	R		
				ikan		get	р	get	Р	e.	р	CL	Р	CL	p		
				yang													
				sedang													
				dijalan													
				i,													
				kelas													
				yang													
				didud													
				uki dan													
				pendid													
				ikan													
				yang													



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PEIVIERIIVI ZILI IN ILI I

				Rumu		C	apai	ian Kir	nerja	Progr	ram	dan K	era	ngka I	Pend	lanaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	s/ Formu la perhit ungan nnya	ndisi Kine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 202	ın	Tahu 202	un	Tahu 202	ın	Tahı	un.	Tah	un	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	R T	arg	R	Targ	R	Targ	R		
						get	p	get	p	et	p	et	p	et	p		
				ditama													
				tkan													
		Harapan Lama Sekolah	tahu			12,		12,		12,		12,		13,		Cirebon	Dinas
			n			52		67		82		97		12		Sejahte	Pendi
																ra	dikan
			pros	LIT+ t				96,		97,		97,				Cirebon	Dinas
			en	= L+ t		96		58		16		74		98		Sejahte	Pendi
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek aksara		P+ t x		%		%		%		%		%		ra	dikan
		Angka Lulusan	pros													Cirebon	Dinas
		Paket A Setara SD (%)	enta			95		95		95		95		95		Sejahte	Pendi
		Paket B Setara SMP (%)	se			95		95		95		95		95		ra	dikan
		Paket C Setara SMA (%)				95		95		95		95		95			
			pros	APK												Cirebon	Dinas
		Prosentase Capaian APK	enta	t=E t		11		11		11		112		11		Sejahte	Pendi
	Program Wajib Belajar Pendidikan	APK SD/MI (%)	se	h		5		4		3		110		1		ra	dikan
	Dasar 9 Tahun	APK SMP/MTs (%)		h X		113		112		111				109			

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		Ca	apai	ian Kin	nerja	a Progr	am	dan K	erai	ngka P	enda	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 2020		Tahu 202		Tahu 2022		Tahu 202	3	Tahu 202		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar		Tar		Targ		Targ		Targ	R		
				100		get	р	get	р	et	р	et	р	et	p		
				100													
				h P, tx													
				h													
		Prosentase Capaian APM	pros			100		100		100		100		100		Cirebon	Dinas
		APM SD/MI (%)	enta			98,		98,		98,		99,		99,		Sejahte	Pendi
		APM SMP/MTs (%)	se			30		59		89		19		48		ra	dikan
		Prosentase Angka Siswa yang	pros													Cirebon	Dinas
		Melanjutkan Sekolah	enta													Sejahte	Pendi
		SD ke SMP (%)	se			100		100		100		100		100		ra	dikan
		SMP ke SMU (%)				80		83		85		87		90			
		Prosentase Sarana dan Prasarana	pros													Cirebon	Dinas
		Sekolah	enta													Sejahte	Pendi
		Kondisi ruang kelas SD yang baik (%)	se			70,		70,		71,		71,		72,		ra	dikan
		Kondisi ruang kelas SMP yang baik (%)				42		84		27		70		13			



1960600	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		C	220	ian Kin	ori	o Drogr	nm	don K	oro	nalza D	and	onoon	Peran
					4		apa.	ian Kin	icija	a i i ogi	am	uan K	cra	iigka i	cnu	anaan	
				<i>'</i>	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahı	ın	m	Pena
Kode		(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	202	1	2022	2	202	3	202	4		ngun
	Pembangunan Daerah	outcome)		nnya	MD											unggula	g
					ahun											n	Jawa
					201											Bupati	b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
					,	get	р	get	р		р		р		p		
						80,	Р	81,	Р	81,	Р	82,	Р	82,	Р		
						5		0		50		0					
						5		U		50		U		4			
																~	
				Angka												Cirebon	
				perkiraa												Sejahte	
			tahu	n lama												ra	
			n	hidup													
				rata-													
				rata													
				pendud													
				uk													
	Sasaran 2.2			dengan													
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup		asumsi													
	masyarakat			tidak													
	J			ada		71,		71,		71,		72,		72,			
				peruba		82		91		99		07		15			
				peruba		04		21		22		07		13			



University and	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		C.	ana	ian Kin	eria	Progr	·am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
					1		ара	ian Kii	ICIJA	TTOGI	am	uan K	cra	IIgka I	cnu	allaall	
				,	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahı		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	202	1	2022	2	202	3	202	4	unggula	ngun
	i chibanganan bacian	outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201											Dupan	ъ
					8)	Tar	R	Tar	R	Γarg	R	Targ	R	Targ	R		-
						get	р	get	р	et	p	et	p	et	p		
				han													
				pola													
				mortalit													
				as													
				menuru													
				t umur													
			pros													Cirebon	Dina
			enta													Sejahte	s
	Program Peningkatan Keselamatan	Prosentase penanganan komplikasi	se			81		82		83		84		85		ra	Keseh
	Ibu Melahirkan dan Anak	kebidanan				%		%		%		%		%			atan
			pros													Cirebon	
	Program Peningkatan Pelayanan		enta			10		100		100		100		100		Sejahte	
	Kesehatan Anak Balita	Prosentase neo komplikasi yang ditangani	se			0 %		%		%		%		%		ra	
			inde			0,2		0,		0,		0,		0,			
	Program Upaya kesehatan		ks			1/		25/		30/		35/		40/			
	Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)				21		25		30		35		40			



				Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerja	a Progr	am	dan K	erai	ngka P	enda	anaan	Peran
				s/	ondisi											Kaitan	gkat -
				Formu	Kine											dengan	Daera
			_	la	rja											Prrogra	h _
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	202	1	202	2	202	3	202	4	unggula	ngun
		outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201	_	1				_	_		_	_		b
					8)	Tar	R	Tar		Targ		Targ		Targ	R		
						get	р	get	р	et	р		p		p		
						%		%		%		%		%			
	Durana Dania da Araban Dalaman	D	pros			10		100		100		100		100			
	Program Peningkatan Pelayanan	Persentase pelayanan kesehatan usia	enta			10 0 %		%		%		%		%			
	Kesehatan usia lanjut	lanjut	se			0 %		70		70		70		70			
	Program Promosi Kesehatan dan		pros			67		67		71		73		75			
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	enta			%		%		%		%		%			
	1 emberdayaan Masyarakat	Persentase penaggulangan KLB	pros			70		70		70		70		70			
	Program Pencegahan dan	penyakit dan keracunan makanan 1 x	enta			10		100		100		100		100			
	Penanggulangan Penyakit Menular	24 jam	se			0 %		%		%		%		%			
	Tenangguangan Tenyakit Menulai	2 jain	pros			0 70		70		70		70		70			
			enta			94		94		94,		95		95			
		Persenta Imuniasasi Dasar lengkap	se			%		%		5 %		%		%			
		2 or one a manager Basar Torighap	pros			,,,		,,,		3 ,0		,,,		,,,			
	Program Pengendalian Penyakit	Persentase penderita hipertensi yang	enta			10		100		100		100		100			
	Tidak Menular (PTM)	dilayani secara standar	se			0 %		%		%		%		%			
	(,	J				- /-					<u> </u>						

	I NOVINGITAWA DANAT			Rumu		Ca	apa	ian Kin	erja	a Progr	am	dan K	era	ngka Po	enda	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 202		Tahu 202		Tahu 2022		Tahu 202		Tahu 2024		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar		Targ		Targ		Targ	R		
						get	р	get	p	et	p	et	р	et	p		
		Persentase penderita DM yang dilayani secara standar	pros enta se			10 0 %		100		100		100		100 %			
		Secura standar	pros			0 70		70		,,,		, 0		,,,			
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	enta se			35 %		40 %		45 %		50 %		60 %			
	Resenatan	Tertama (FKTT) terakteurtasi	pros			70		70		70		70		70			
		Persentase rumah sakit terakreditasi	enta			10 0 %		100		100		100		100 %			
		reisentase ruman sakit terakreditasi	se pros			0 %		70		70		70		70			
		Persentase laboratorium kesehatan	enta			40		50		60		70		80			
		terakreditasi	se			%		%		%		%		%			
	Program Pengembangan		pros enta			85, 98		86, 88		87, 78		88, 68		89, 58			
	Lingkungan Sehat	Prosentase rumah sehat	se			%		%		%		%		%			
			pros														



				Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka F	end	anaan	Peran
				s/ Formu	ondisi Kine											Kaitan dengan	gkat Daera
		To dilate a Trianaia	Coto	la	rja			∕T> 1				Tahı		T - 1		Prrogra	h Pena
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/	Satu an	perhit ungan	Awal RPJ	Tahu 202		Tahu 202		Tahu 202		202		Tahı 202		m	ngun
11000	Pembangunan Daerah	outcome)		nnya	MD		•		-		_		•			unggula	g
					ahun											n Bupati	Jawa
					201											Биран	b
					8)	Tar	R	Tar		Targ		Targ		Targ	R		
						get	p	get	р	et	р	et	p	et	p		
			enta														
			se														
	G	Demonstrate and described and discontinuous	pros		10.7	0.7		0.0		0.7							
	Sasaran 2.3 Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduuduk miskin di bawah garis kemiskinan	enta		10,7	9,7		9,2		8,7		8,2		7,7			
	Program Pemberdayaan Fakir	bawan garis kemiskinan	se pros		0	U		U		U		0,4		1,1			
	Miskin, Komunitas Adat Terpencil		enta														
	(KAT) dan PMKS lainnya		se														
	(ivii) dan i wixo ianniya		pros														
	Program Pelayanan dan		enta														
	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		se														
	3		pros														
	Program Pembinaan Anak		enta														
	Terlantar		se														
	Program Pemberdayaan		pros														
	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		enta														



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PEIVIERIIN I AUTO PROVINSI JAWA BARAT

				Rumu		Ca	apai	an Kin	nerja	ı Progr	ram	dan K	erai	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	ungan nnya	Mindisi Kine rja Awal RPJ MD ahun 201	Tahu 202		Tahu 202		Tahu 202		Tahu 202	3	Tahu 202		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	p	get	р	et	p	et	p	et	p		
			se														
	Program Kemitraan Peningkatan	Tercapainya UHC Kepesertaan JKN				93		95		97		99		10			
	Pelayanan Kesehatan	KIS				%		%		%		%		0 %			
					10.5	0.1		0.1									
	Sasaran 2.4	Prosesntase Angka Penganggura			10,5	9,1		8,4		7,8		7,3		6,7			
	Menurunnya angka Pengangguran	terbuka			6	1		7		7		1		9			
	Program Peningkatan Kesempatan	Tercapainya Peningkatan Kesempatan															
	Kerja	Kerja															
	Program Peningkatan Kualitas dan	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan															
	Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja															
	Program Pengembangan Wilayah	Bertambahnya wilayah tujuan															
	Transmigrasi	transmigrasi															
		Tercapainya Pembinaan transmigran															
	Program Transmigrasi Lokal	lokal			100	100		100		100		100		100			



				Rumu		Ca	apa	ian Kir	erja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				s/	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	2020	0	202	1	202	2	202	3	202	4	unggula	ngun
	3.1	outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201								•				b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	р	get	р	et	р	et	p	et	р		
	Program Pembinaan Lingkungan	Tercapainya Pembinaan di lingkungan															
	Sosial	hasil tembakau			100	100		100		100		100		100			
	Program Perlindungan																
	Pengembangan Lembaga	Meningkatnya Perlindungan Tenaga															
	Ketenagakerjaan	Kerja															
	Program Penciptaan Iklim Usaha	Tercapainya Penciptaan Iklim Usaha															
	Kecil Menengah yang Kondusif	Kecil Menengah yang Kondusif															
	Program Pengembangan	Tercapainya Pengembangan															
	Kewirausahaan dan Keunggulan	Kewirausahaan dan Keunggulan															
	Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
	Program Peningkatan Kualitas	Tercapainya Peningkatan Kualitas															
	Kelembagaan Koperasi	Kelembagaan Koperasi															
		Tercapainya Pengembangan Sistem															
	Program Pengembangan Sistem	Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro															
	Pendukung Usaha Bagi Usaha	Kecil															
	Mikro Kecil Menengah	Menengah															



- 1960 Grant at 98	ROVINSI JAWA BAKAT	1		Rumu			000	ian Kin	onio	Dnogn	10.500	don V	0401	n ~1-0	Dond	2020	Peran
					4		apa	ıan Kin	епа	rrogr	am	uan K	crai	пдка	rena	апаап	
				,	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	perhit	Awal	Tahu	ın	Tahu	n	Tahu	ın	Tahu	ın	Tah	ıun	m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	2021	1	2022	2	202	3	20	24		ngun
	Pembangunan Daeran	outcome)		nnya	MD											unggula	g
					ahun											n D	Jawa
					201											Bupati	b
					8)	Tar	R	Tar	RΊ	Γarg	R	Targ	R	Targ	R		
						get	р	get	p	et	р	et	р	et	p		
	MISI 3 Meningkatkan kualitas hi	l dup masyarakat Kabupaten Cirebon ya:	ng senan	tiasa me	_ nerapk	an Nil	lai-l	Nilai A	gam	na, Bu	ıdi l	Pekert	i, S	antu	n daı	1	
	Beretika																
	Tujuan 1																
	Meningkatkan Keshalehan social		Pros														
	dan kerukunan antar dan intern		enta		75	78		81		84		87		90			
	umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	se		%	%		%		%		%		%			
			lokas	Berkur													
			i	angny													
				а													
				jumla													
				h													
				lokasi													
	Sasaran 3.1			rawan	42												
	Menurunnya kegiatan Asusila di			minu	loka												
	Masyarakat	Angka penyakit masyarakat		man	si	25		19		13		7		2			



	I NOVINGITAWA DANAT			Rumu		Ca	apa	ian Kir	erj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				s/ Formu	ondisi Kine											Kaitan	gkat Daera
				la	rja											dengan	h
		Indikator Kinerja	Satu		Awal	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahu	ın	Tahı	ın	Tahı	ın	Prrogra	Pena
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202		202		202		202		202		m	ngun
11040	Pembangunan Daerah	outcome)		nnya	MD		•		-		_		•			unggula	g
					ahun											n	Jawa
					201											Bupati	ь
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	р	get	р	et	p	et	р	et	p		
				keras													
				dan													
				rawan													
				prostit													
				usi													
					20												
	Program Peningkatan	Daylarana arana iranalah lalanai naman			titik												
	Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Berkurangnya jumlah lokasi rawan minuman keras dan rawan prostitusi			raw	8		4		4		4		4			
	Masyarakat (FEKAT)	illinuman keras dan rawan prostitusi			an	0		4		4		4		4			
	Sasaran 2.6																
	Menurunnya Gesekan (Friksi)																
	antar dan internal umat beragama	Angka Konflik Agama			0	4		3		2		2		1			
	Program Peningkatan Kualitas																
	Kehidupan Keagamaan																



- Organization	FROVINSI JAWA BARAT			Rumu		C	ana [.]	ian Kin	eri	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	ondisi Kine rja Awal RPJ MD ahun 201	Tahu 202	ın	Tahu	ın	Tahu	n	dan K Tahu 202	ın	Tahı	ın	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	Peran gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	P	Targ	P	Targ	P	Targ	R		
					0)	get	р	get	р		р		p		p		
	Program Kemitraan					gct	Р	gct	Р	Ct	Р	Ct	Р	Ct	Р		
	pengembangan Wawasan																
	Kebangsaan																
	Rebailgsaali																
	Sasaran 2.7																
	Meningkatnya pertumbuhan																
	ekonomi sektor unggulan																
	Sasaran 2.8		poin														
	Meningkatnya ketahanan pangan		pom					88,		89,		89,					
	mansyarakat	Skor Pola Pangan harapan (PPH)			87	88		50		50		75		90			
	mansyarakat	Skoi Fola Faligali flarapali (FFII)	nros	Jumla	01	00		30		30		13		90			
			pros enta	h													
				cadan													
			se														
	Program Peningkatan Ketahanan	Penguatan cadangan pangan per 100		gan	10,7	26,		45,		66,		84,		104			
	Pangan (Pertanian/Perkebunan)	ton		panga	6	38		45, 58		67		72		,1			
	rangan (renaman/renkebuhan)	ton		n	O	30		30		07		12		,1			



	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		Ca	apa	ian Kin	nerja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	s/ Formu la perhit ungan nnya	MD ahun 201	Tahu 202	ın O	Tahu 2021	ın 1	Tahu 2022	ın 2	Tahu 202	ıın	Tahu 202	ın 4	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar		Tar		Targ		Targ		Targ	R		
				1		get	р	get	р	et	р	et	þ	et	р		
				kabup aten/1													
				440													
				ton X													
				100%													
			pros	Jumla													
			enta	h desa													
			se	rawan													
				panga													
				n yang													
				diinter													
				vensi/													
				total													
				jumla													
				h desa	26,0												
		Daerah rawan pangan yang diintervensi		rawan	1	20		20		20		20		20			



	I NOVINSI JAWA DANAT			Rumu		C	apa	ian Kir	nerja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				· ·	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja											Prrogra	h
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	•	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahı		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ	202	0	202	1	202	2	202	3	202	4	unggula	ngun
	<u> </u>	outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201		1					-	_	_			b
					8)	Tar	R	Tar		Targ		Targ		Targ	R		
						get	р	get	p	et	p	et	р	et	p		
				panga													
				n X													
				100%													
	Sasaran 2.9				77,3	80,		81,		0.2		0.4		85,			
	Meningkatnya penyediaan layanan	Indeks pembangunan infrastruktur			6	16		61		83, 06		84, 51		96			
	infrastruktur wilayah	wilayah yang mantap			0	10		01		06		51		96			
	ililiastruktur wilayan	whayan yang mantap	nnoa	(Panja													
			pros enta	, -													
			se	ng jalan													
			SC	kondis													
				i baik/													
				Panjan													
	Program Pembangunan Jalan dan	Prosentase jaringan jalan kabupaten		g Jalan	45,8	49,		52,		55,		60,		63,			
	jembatan	dalam kondisi baik		Kabup	1	03		26		48		32		54			
	Jembalan	dalam kuliulsi baik		Mabup	1	0.5		20		70		54		J-T			



1990	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		C	anai	ian Kin	eria	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
					ondisi		_pa			- 11081	A111						gkat
				Formu	Kine											Kaitan	Daera
				la	rja											dengan	h
		Indikator Kinerja	Satu		ija Awal	Tahu	110	Tahu		Tahu		Tahu		Tahı	140	Prrogra	Pena
Kod	Misi/Tujuan/Sasaran/Program			_	RPJ	202		2021		2022		202		202		m	
Koa	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan		202	U	2021	L	2022	2	202	3	202	4	unggula	ngun
		outcome)		nnya	MD											n	g
					ahun											Bupati	Jawa
					201		-	<i>m</i>	_	m 1		-		m.	1		b
					8)	Tar		Tar		Targ		Targ		Targ	R		
				,		get	р	get	p	et	р	et	р	et	p		
				aten)													
				x100%													
			pros	(Panja													
			enta	ng													
			se	jalan													
				yang													
				memili													
				ki													
				trotoar													
				dan													
				draina													
				se /													
				Panjan													
				g													
	Program Pembangunan Saluran	Persentase jalan yang memiliki trotoar		Jalan		5,3		5,5		5,7		5,9		6,1			
	Drainase/Gorong-gorong	dan drainase		Kabup	5	5		6		7		8		4			



	I HOVINSI JAWA DAHAT			Rumu		C	apa	ian Kir	nerj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
				,	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
				la	rja							m 1				Prrogra	h
TZ 1	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satu	_	Awal	Tahu		Tahu		Tahu		Tahu		Tahı		m	Pena
Kode	Pembangunan Daerah	(Tujuan/impact/	an	ungan	RPJ MD	202	U	202	1	202	2	202	3	202	4	unggula	ngun
		outcome)		nnya	ahun											n	g Jawa
					201											Bupati	b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	р	get	р		р		р		р		
				aten)			1		1		-		-		-		
				x100%													
				(Panja													
			Pros	ng													
			enta	jalan													
			se	yang													
				terjaga													
				keman													
				tapan													
				nya /													
				Panjan g jalan													
	Program			Kabup													
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan yang terjaga		aten)	47,1	49,		49,		49,		49,		49,			
	dan jembatan	kemantapannya		x100%	8	67		67		67		67		67			
	Program Pengembangan dan	Persentase jaringan irigasi dalam	pros	(Panja	62,3	63,		64,		65,		66,		67,			



The same of the sa	FROVINSI JAWA BARAT			Rumu		Ca	apa	ian Kin	eri	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	MD ahun	Tahu 202	ın	Tahu 202	ın	Tahu 2022	ın	Tahu 202	ın	Tahı	ın	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	p	get	р	et	р	et	p	et	p		
	Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa	kondisi baik	enta	ng	6	50		50		50		50		50			
	dan Jaringan Pengairan lainnya		se	salura													
				n													
				irigasi													
				kondis													
				i baik/													
				Panjan													
				g													
				salura													
				n													
				irigasi													
				Kabup													
				aten) x100%													
		Persentase berkurangnya luas daerah	pros	(Luas													
	Program Pengendalian Banjir	genangan akibat banjir	enta	daerah	1,1	0,9		0,8		0,7		0,6		0,5			



100	PROVINSI JAWA BARAT			Rumu		Ca	apa	ian Kin	erja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun 201	Tahu 2020	0	Tahu 202	1	Tahu 2022 Targ	2	Tahu 202: Targ	3	Tahu 202 Targ		Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					0)	get	р	get			p			et	p		
			se	banjir			-		_				_		-		
				tahun													
				berken													
				aan /													
				Luas													
				daerah													
				rawan													
				banjir)													
				100%													
			pros	(Jumla													
			enta	h													
	Program Pembangunan Sarana	Rasio ketersediaan sarana prasarana	se	halte/t	45	50		55		60		65		70			
	dan Prasarana Perhubungan	perhubungan (halte/terminal) yang		ermina													
		layak fungsi		1 yang													
				layak													



	THOUNDIDAWA DANAT			Rumu		Ca	apai	ian Kin	erj	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	Mine rja Awal RPJ MD ahun	Tahu 2020	0	Tahu 202	1	Tahu 2022	2	Tahu 2023	3	Tahu 202	4	Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar get	R p	Tar get		Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				fungsi / Jumla h kebut uhan(e ksistin g) halte/t ermina 1) x 100%													
	Sasaran 2.10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin		52,4 3	52, 59		52, 67		52, 76		52, 84		52, 92			



				Rumu		Ca	apa	ian Kir	nerja	a Progr	am	dan K	era	ngka P	end	anaan	Peran
Kode				,	ondisi											Kaitan	gkat
				Formu	Kine											dengan	Daera
	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			la	rja			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Prrogra	h
		Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	-	Awal	RPJ 2020 2 MD nun								Tahı		m	Pena
				ungan	RPJ									2024		unggula n	ngun
				nnya													g
					ahun						 					Bupati	Jawa
					201	Tar	R	Tar	D	Targ	Ъ	Топа	D	Targ	R		b
					0)	get		get	p	_	р	Targ et	p		p		
			Pros			gct	р	gct	Р	Ct	Р	Ct	Р	Ct	Р		
	Program Pengendalian dan	Persentase hasil pemantauan kualitas	enta		48,0	48,		48,		49,		49,		49,			
	Pencemaran	air yang memenuhi baku mutu	se		6	54		78		02		26		50			
		January 11 and 1	Pros		81,6	81,		81,		81,		81,		81,			
		Persentase hasil pemantauan kualitas	enta		3	66		68		70		71		72			
		udara yang memenuhi baku mutu	se														
			Pros	SDA													
			enta	yang													
			se	terkon													
				servasi													
				/ Total													
				SDA													
	Program Perlindungan dan	Persentase SDA yang terkonservasi		yang	4,5	4,5		9		9		9		9			
	Konservasi Sumber Daya Alam			kritis													
	Program Pengelolaan Ruang	Luasan RTH	ha		1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
	Terbuka Hijau																



	I NOVINSI JAWA BARAT			Rumu		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Peran		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Formu la perhit ungan nnya	MD ahun			un Tahun		Tahun 2022		Tahun 2023				Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	gkat Daera h Pena ngun g Jawa b
					8)	Tar	R	Tar	R	Targ	R	Targ	R	Targ	R		
						get	p	get	p	et	p	et	p	et	p		
	Program Pengembangan Kinerja	Persentase pengurangan sampah dan	Pros enta		6,25	12, 5		22, 5		40		60		70			
	Pengelolaan Persampahan	penanganan sampah	se		0,20	Ü		O		10							
	Sasaran 2.11		Pros														
	Meningkatnya kapasitas		enta														
	pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	se		6,25												
	<u> </u>																
		Indeks kemandirian fiskal daerah															